

Menyelamatkan Bahasa Ibu

Oleh: P. Ari Subagyo

“KAMI anggota Masyarakat Linguistik Indonesia berikrar untuk memberi perhatian kepada bahasa ibu di daerah kami masing-masing, mendorong penggunaannya, membantu proses pewarisan ke generasi penerus melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.”

Itulah ikrar anggota Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) saat penutupan Kongres Internasional MLI di Bandar Lampung, 19-22 Februari 2014, dengan tema “Peran Bahasa Ibu dan Bahasa Nasional dalam Pengembangan Potensi Penutur Bahasa”. Mencuat keprihatinan besar atas nasib ratusan bahasa ibu atau bahasa daerah di Indonesia. Ikrar dan tema itu tentunya juga menyamgkut momen International Mother Language Day atau Hari Bahasa Ibu Internasional (HBII) yang sejak tahun 2000 dirayakan The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) setiap 21 Februari.

Mengapa bahasa ibu perlu diselamatkan? Apa langkah nyata yang dapat kita lakukan?

700-an bahasa ibu

HBII bermula dari peristiwa tragis sekaligus heroik yang terjadi di Bengali (sekarang Bangladesh). Pada 1947 Bengali terbagi dua karena faktor agama. Warga Hindu bergabung dengan India, sedangkan warga Islam memilih Pakistan. Pada 1948 ketegangan memuncak sejak Paki-

stan meresmikan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional. Kebijakan itu menyulut protes penutur bahasa Bengali yang merupakan warga mayoritas di Pakistan Timur. Pemerintah Pakistan mengabaikan protes itu sehingga mahasiswa Universitas Dhaka menggelar demonstrasi besar-besaran. Pada 21 Februari 1952, empat mahasiswa tewas dalam memperjuangkan penggunaan bahasa ibu mereka, yakni bahasa Bengali.

Peristiwa itu membuktikan bahwa di belakang sebuah bahasa berdiri sekumpulan manusia beserta hak mereka menggunakan bahasa. Jika hak itu dicabut atau dirampas, masyarakat dapat marah. Apalagi jika bahasa identik dengan martabat atau harga diri, mati pun rela dijalani.

Pewajiban bahasa Urdu dan pelarangan bahasa Bengali juga memperlihatkan adanya dominasi sebuah kelompok atas kelompok yang lain. Dominasi pada gilirannya menyangkut bahasa. Bahasa kelompok dominan diutamakan, tetapi bahasa kelompok pinggiran dienyahkan.

Gejala itu terjadi di Indonesia. Di negeri ini terdapat 700-an bahasa ibu atau bahasa daerah, namun sebagian besar sedang menghadapi kematian. Perlahan tapi pasti bahasa-bahasa daerah tersingkir dan akhirnya mati. Penyebab utamanya adalah dominasi bahasa Indonesia

dan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional dan internasional.

Pengajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang begitu gencar sejak tahun 1970-an membuat bahasa daerah kehilangan gengsi, lalu ditinggalkan penuturnya. Kenyataan ini membenarkan pendapat Bjeljac-Babic (2000): “Kalau hendak mematikan sebuah bahasa, ajarkanlah bahasa lain”.

Padahal, bahasa ibu sesungguhnya memudahkan anak belajar memahami dunia, termasuk bahan pelajaran di kelas-kelas awal. Menurut ahli psikolinguistik Timothy Jay (2003), bahasa ibu memungkinkan kita berekspresi secara otentik dan tuntas sehingga dapat mengurangi beban-beban psikologis kita.

Langkah nyata

Dalam ikrar di atas, anggota MLI bertekad “mendorong penggunaan bahasa ibu, membantu proses pewarisannya ke generasi penerus melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.” Tekad tersebut terkesan teoretis alias tidak praktis. Maklum mereka kebanyakan memang akademisi.

Apa langkah nyata yang dapat dilakukan warga masyarakat? Kita dapat mengikuti skenario UNESCO dan tawaran Grenoble dan Whaley

(2003). Prinsipnya, kita harus terus mempromosikan penggunaan bahasa ibu untuk membangun penghargaan atas keberagaman bahasa dan budaya.

Jika prinsip itu diterapkan pada bahasa Jawa, langkah nyata mempromosikan bahasa ibu ialah menggunakannya dalam sebagian urusan kita, mulai dari komunikasi antarpribadi hingga komunikasi resmi yang bersifat publik. Dalam ranah pribadi, bahasa Jawa perlu digunakan untuk komunikasi lewat layanan pesan pendek, surat elektronik, dan media sosial.

Adapun dalam ranah resmi dan publik, langkah pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang gencar menggunakan bahasa Jawa dalam rapat atau hari tertentu patut diapresiasi. Namun, langkah itu perlu diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat. Sebagai contoh, di wilayah perkotaan atau semi-perkotaan, rapat-rapat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) secara berkala perlu dilakukan dengan bahasa Jawa.

Jika tidak digunakan, bahasa Jawa (dan bahasa ibu apa pun) akan menjadi *wastra lungset ing sampiran*: kekayaan yang hilang sia-sia karena tidak digunakan. ***

Dr. P. Ari Subagyo MHum, Dosen di Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta; anggota aktif MLI.